

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF

(HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

Penulis:

Sudibyanung, Koes Widarbo, Fahmi Charis MDW,
Sutaryono, Sukmo Pinuji, Wahyuni,
Setiowati, Sri Kistiyah, Yendi Sufyandi,
Aristiono Nugroho, Suharno, Nuraini Aisiyah,
Slamet Muryono, Asih Retno Dewi, Priyo Katon Prasetyo,
Sri Kistiyah, Eko Budi Wahyono, dan Bambang Suyudi

Penyunting:

Bambang Suyudi
Ahmad Nashih Luthfi
Asih Retno Dewi

STPN Press, 2019

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN
YANG RESPONSIF
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)
©PPPM-STPN**

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh

STPN Press,
Cetakan pertama, Desember 2019

Bekerja sama dengan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM-STPN)

Penulis:

Sudibyanung, Sutaryono, Setiowati
Aristiono Nugroho, Slamet Muryono
Eko Budi Wahyono, dkk

Editor:

Bambang Suyudi
Ahmad Nashih Luthfi
Asih Retno Dewi

Layout dan Cover: Laiq
Pracetak: Tim STPN Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN
YANG RESPONSIF
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)

Yogyakarta: STPN Press, 2019
00 + 000 hlm.: 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-11-5

KAJIAN KONDISI PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH BERLERENG DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT (Studi di Pagerharjo, Kulonprogo)

Slamet Muryono, Asih Retno Dewi, dan Priyo Katon Prasetyo

A. Pendahuluan

Tanah yang merupakan sumber kehidupan manusia, perlu dilestarikan keberadaannya. Pelestarian ini selain tanah sebagai salah satu sumberdaya alam juga pemanfaatan atas tanah tersebut untuk menopang kehidupan masyarakat di suatu tempat. Selain dimanfaatkan berdasarkan kondisi fisiknya perlu dipertimbangkan juga keberadaannya ditinjau dari segi ekonomi.

Salah satu penyebab kerusakan tanah adalah penggunaan tanah yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan di antaranya disebabkan oleh aktifitas manusia seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti oleh aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup untuk tempat tinggal, usaha pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sering menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah di suatu wilayah. Penggunaan tanah bukan merupakan penggunaan tanah yang sesaat saja, tetapi berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Perubahan penggunaan tanah untuk kawasan pertanian pada umumnya tidak memperhatikan konservasi tanah sehingga berdampak pada kerusakan tanah dan penurunan fungsi tanah. Apabila hal ini terjadi pada daerah-

daerah yang berlereng sampai berlereng curam, maka kerusakan tanah bukan hanya terjadi di daerah tersebut saja tetapi pada daerah-daerah yang berada di bawahnya.

Penggunaan tanah di daerah berlereng, seringkali terjadi karena manusia berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan membuka tanah untuk keperluan usaha pertanian di daerah-daerah yang seharusnya dilindungi karena kondisi fisiknya yang terbatas. Daerah-daerah tersebut arahan penggunaan tanahnya bukan untuk usaha pertanian tetapi untuk budidaya tanaman tahunan yang pada umumnya adalah budidaya tanaman kehutanan seperti tanaman jati, mahoni, sengon, dan tanaman keras lainnya yang perakarannya mampu untuk menahan erosi. Menurut Suripin (2002, 11-12), erosi adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Terdapat lima faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi, yaitu iklim, tanah, topografi, vegetasi, dan kegiatan manusia. Selain faktor iklim dan tanah yang merupakan faktor alami, faktor topografi dan vegetasi masih memungkinkan untuk bisa dikendalikan manusia dalam menggunakan tanah di suatu wilayah.

Topografi berperan terhadap terjadinya erosi dalam hal menentukan kecepatan aliran permukaan yang membawa partikel-partikel tanah, sedangkan vegetasi berperan untuk melindungi tanah dari pukulan langsung butiran air hujan dan memperbaiki struktur tanah melalui penyebaran akar-akarnya. Penggunaan tanah disesuaikan dengan sifat fisik dari tanah tersebut terutama kemiringan lereng dan tingkat kekasaran butir tanah untuk mencegah terjadinya erosi. Tanah yang sangat rentan erosi sebaiknya dihutankan, selain itu perlu dibuat terasering atau sengkedan. Penyesuaian penggunaan tanah secara umum dapat digolongkan empat pola penggunaan tanah yaitu: a). wilayah yang penggunaan tanahnya sudah baik, dan tingkat kerentanan terhadap erosi memang rendah seperti areal perkampungan dan persawahan; b). wilayah yang penggunaan tanahnya memerlukan terasering, biasanya terdapat pada tanah pertanian yang sudah tetap (*settle*) tetapi berlereng; c). wilayah yang sebaiknya ditanami dengan tanaman keras, secara alamiah pada ketinggian di atas 500 m dpal, digunakan untuk pertanian tanaman keras, yang apabila daerah ini ditanami tanaman muda

(tanaman semusim), maka akan sangat rentan terhadap erosi tanah; d). wilayah yang harus ditanami tanaman keras adalah daerah berlereng, tekstur tanah kasar, dan curah hujan tinggi, sehingga sebaiknya diolah dengan sistem terasering dan ditanami tanaman yang akarnya mampu menahan gerakan tanah.

Kondisi fisik tanah seperti tersebut di atas dijumpai antara lain di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Desa Pagerharjo sebagian besar merupakan daerah berlereng, kondisi seperti ini menyebabkan penduduk desa berupaya untuk mencari mata pencahariannya di bidang non pertanian tanah basah (sawah) karena daerah ini tidak memungkinkan dijadikan daerah sawah. Namun demikian, penduduk tetap berupaya mengusahakan usaha tani pertanian tanah kering dengan cara memilih daerah yang memungkinkan untuk itu.

Penggunaan tanah pada daerah berlereng seharusnya menjurus ke arah konservasi antara lain tanaman keras untuk mencegah terjadinya erosi yang akan berdampak pada daerah-daerah yang ada di bawahnya. Umumnya penggunaan tanah di daerah seperti ini berupa hutan lebat dan hutan belukar yang berfungsi lindung. Penggunaan tanah di Desa Pagerharjo khususnya di daerah yang berlereng belum diketahui secara pasti jenis-jenisnya dan dampak dari penggunaan tanah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi penggunaan tanah berlereng dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai kesesuaian penggunaan tanah dengan konsepsi wilayah tanah usaha di daerah berlereng selanjutnya untuk memberikan arahan penggunaan tanah berlereng agar bisa mensejahterakan masyarakat yang menggunakan tanah tersebut.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan mengeksplorasi penggunaan tanah di daerah berlereng. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode komparatif yaitu membandingkan antara penggunaan tanah, kemiringan tanah, dan kesesuaiannya dengan konsep wilayah tanah usaha. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dari hasil penghitungan pendapatan

per kapita masyarakat yang selanjutnya dieksplorasikan secara deskriptif. Selain itu dilakukan analisis tumpang susun peta (*overlay*) antara peta penggunaan tanah, peta kemiringan tanah, peta wilayah tanah usaha untuk mengetahui kesesuaiannya. Hal ini untuk memberikan alternatif dalam pemberian perizinan yang berkaitan dengan penggunaan tanah di daerah berlereng.

B. Konsep Wilayah Tanah Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat

Berkembangnya suatu wilayah sebagai akibat dari dinamika yang terus berlangsung karena adanya pembangunan di segala bidang berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan penggunaan tanah sebagian akibat dari tuntutan kebutuhan hidup penduduk di wilayah bersangkutan. Kondisi demikian ternyata telah banyak menimbulkan permasalahan antara lain terdapatnya penggunaan tanah yang tidak sesuai lagi dengan karakteristik lokasi wilayah tersebut (Suburi 2001). Menurunnya kualitas lingkungan hidup karena penggunaan tanah tidak sesuai lagi dengan kemampuan daya dukung alam yang antara lain adalah kemampuan tanah dari lokasi yang bersangkutan. Pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya di bidang ekonomi saja, melainkan pembangunan di segala bidang yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Mengingat pembangunan selalu membutuhkan tanah, maka diperlukan pula pengaturan penggunaan tanahnya. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), “pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi (tanah), air serta ruang angkasa di daerahnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing”.

Konsep model pengaturan penggunaan tanah, telah diinisiasi oleh I Made Sandy sejak tahun 1977. Konsep yang dikenal dengan Model Wilayah Tanah Usaha (WTU) bertujuan untuk mencapai suatu azas penggunaan tanah lestari dengan pertimbangan penggunaan tanah yang seimbang dan optimal. Model ini dilandasi oleh faktor kemiringan tanah (lereng) dan ketinggian tempat dari permukaan laut sebagai tempat kegiatan masyarakat atau tanah usaha di daerah perdesaan (penggunaan tanah perdesaan). Secara garis besar pembagian wilayah dari konsep WTU ini terbagi menjadi empat wilayah yaitu WTU Terbatas I, WTU

Utama Ia, WTU Utama Ib, WTU Utama Ic, WTU Utama Id, WTU Utama II, dan WTU Terbatas II. Secara rinci, pembagian WTU berdasarkan kriteria lereng dan ketinggian menurut Sandy (1977), Balitbang Dephan (2001), Sony (2008), Hardjowigeno (2011), Waskito dan Arnowo (2017) dapat dijelaskan bahwa sebagai batas tanah usaha yang baik dan tidak baik, ditetapkan kriteria lereng sama dengan dan atau lebih dari 40%. Keberadaan tanah dengan lereng $\geq 40\%$ ini bisa jadi terdapat dimana-mana. Namun meskipun batas lereng yang diambil adalah $\geq 40\%$, tidak berarti bahwa tanah yang berlereng kurang dari 40% boleh diusahakan secara bebas, pengguna tanah harus tetap memperhatikan kelestarian tanah dengan mengambil langkah-langkah dalam mengusahakan tanahnya.

Penggunaan tanah di suatu wilayah, seringkali mencerminkan kegiatan masyarakat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya dalam rangka menopang kehidupan keluarganya sehari-hari agar menjadi sejahtera kehidupannya. Corak penggunaan lahan di suatu desa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, juga sangat bergantung pada kepadatan penduduk, atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan wilayah desa tersebut. Di daerah perdesaan yang masih berpenduduk jarang, memiliki kenampakan ideal bentuk penggunaan lahan yang dominan dan intensif yaitu lahan sawah yang terletak di sekeliling perkampungan. Biasanya semakin jauh dari kampung intensitas penggunaan lahan semakin berkurang. Di luar penggunaan lahan sawah terdapat penggunaan lahan kering untuk tanaman pangan, di luarnya lagi dijumpai lahan ilalang. Pada umumnya, padang ilalang tersebut merupakan bekas usaha pertanian lahan kering juga, hanya saja kemampuan lahan untuk memproduksi, tanaman pangan sudah berkurang. Di luar padang ilalang sering terdapat hutan belukar yang kadang-kadang di dalamnya diusahakan penduduk kampung terdekat untuk perladangan. Apabila kondisi masih memungkinkan lahan ilalang dimanfaatkan pula oleh penduduk setempat sebagai kebun karet misalnya, atau ditanami buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran lain (Ritohardoyo 2013), yang pada prinsipnya diusahakan masyarakat untuk menambah kesejahteraan hidup bersama keluarganya.

Menurut Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung dari pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Sedangkan menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan pendapatan yang mewujudkan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Adapun kebutuhan spiritual dihubungkan dengan pendidikan, keamanan, dan ketenteraman hidup.

C. Kondisi Kelerengan dan Penggunaan Tanah Desa Pagerharjo

Desa Pagerharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Topografi di desa ini sebagian besar adalah landai, bergelombang, berbukit sampai bergunung. Hampir semua fasilitas sosial dijumpai di wilayah desa ini.

Lereng dan ketinggian sebagai dua faktor fisik wilayah dijadikan pedoman untuk menentukan jenis penggunaan tanah pada wilayah tersebut. Arahan penggunaan tanah ini dimaksudkan dalam rangka menuju kepada penggunaan tanah berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian tanah dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi penggunaan tanah khususnya di daerah perdesaan sekaligus mensejahterakan masyarakat yang menggunakan tanah tersebut.

Ketinggian wilayah seringkali berkorelasi dengan jenis penggunaan tanah apa yang diusahakan di wilayah tersebut. Pada ketinggian wilayah antara 100–500 meter dpal, masih dijumpai penggunaan tanah sawah meskipun berupa sawah 1 kali setahun karena tidak terdapat saluran irigasi, mayoritas dijumpai penggunaan tanah pertanian tanah kering berupa tegalan, kebun campuran maupun ladang. Beberapa tempat ada penggunaan tanah perkebunan dengan tanaman sejenis seperti kopi,

coklat, karet. Pada ketinggian wilayah antara 500–1.000 meter dpal, masih ada penggunaan tanah sawah meskipun merupakan sawah tadah hujan dengan sekali panen setahun. Yang paling cocok pada ketinggian ini adalah tanaman iklim sedang maupun perkebunan. Cengkeh dan teh sering dijumpai pada daerah dengan ketinggian ini. Untuk wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m dpal, umumnya terdapat hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi wilayah yang ada di bawahnya.

Desa Pagerharjo berada pada 300–880 m dpal. Daerah yang paling rendah (300 m dpal) berada di bagian barat selatan yaitu di wilayah Padukuhan Sinogo. Adapun daerah yang tertinggi (880 m dpal) berada di bagian utara yang termasuk ke dalam wilayah Nglingsgo Barat. Di bagian tengah yaitu di sekitar Ibukota Desa Ngemplak, ketinggian wilayahnya sekitar 500 m dpal. Ketinggian ini yang terendah di wilayah barat semakin ke tengah semakin tinggi, dan daerah yang paling tinggi berada di Desa Pagerharjo sebelah utara. Secara terinci data ketinggian wilayah dan luasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ketinggian Wilayah dan Luasnya

No.	Ketinggian Wilayah (dpal)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	300 - 400	166,46	14,59
2	400 - 500	288,74	25,32
3	500 - 600	307,16	26,94
4	600 - 700	238,64	20,92
5	700 - 800	87,22	7,65
6	Lebih dari 800	52,28	4,58
	Total	1.140,50	100,00

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2019

Kemiringan tanah (lereng) juga berpengaruh terhadap penggunaan tanah yang ada di suatu wilayah. Pada lereng yang datar sampai dengan landai biasanya masih dijumpai penggunaan tanah sawah 2 kali setahun. Pada daerah ini terdapat juga penggunaan tanah tanaman semusim seperti tegalan yang ditanami palawija. Pada daerah landai sampai bergelombang, banyak dijumpai penggunaan tanah pertanian tanah kering seperti kebun campuran dan lading. Sementara itu di daerah yang

bergelombang sampai berbukit, penggunaan tanahnya juga pertanian tanah kering dan juga perkebunan. Pada daerah yang berbukit sampai bergunung bisa dijumpai hutan.

Wilayah Desa Pagerharjo berada pada lereng mulai dari 8–15% (klasifikasi lereng landai sampai bergelombang) dan berakhir pada lereng 30–40% (klasifikasi lereng daerah berbukit sampai dengan bergunung). Rincian luas wilayah berdasarkan lereng tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah (Lereng)

No.	Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	8 – 15 %	396,32	34,75
2	15 – 25 %	439,20	38,51
3	25 – 30 %	199,89	17,53
4	30 – 40 %	105,09	9,21
	Total	1.140,50	100,00

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2019

Penggunaan tanah di suatu wilayah, umumnya merupakan cerminan dari aktivitas dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut khususnya yang bergerak di bidang pertanian. Pada lokasi yang penggunaan tanahnya berupa permukiman, masyarakat menggunakan tanah tidak jauh dari lokasi tersebut atau di sekitarnya. Masyarakat menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan untuk mengelolanya. Demikian pula yang terjadi di daerah berlereng. Ada yang sebagian mengolah tanah dengan intensif yaitu menggunakan sistem terasering untuk mencegah terjadinya erosi, namun ada pula masyarakat yang menggunakan tanah seadanya tanpa melalui pengelolaan yang intensif. Artinya masyarakat hanya menanam komoditi tertentu di tanah-tanah yang dimilikinya. Demikian pula yang terjadi di Desa Pagerharjo.

Kondisi fisik wilayah Desa Pagerharjo yang sebagian besar merupakan daerah berlereng, penggunaan tanah mayoritasnya adalah kebun campuran. Berturut-turut berdasarkan luas penggunaan tanahnya adalah permukiman, tegalan/ladang, sawah tadah hujan, sawah irigasi, dan semak belukar. Secara rinci luas penggunaan tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaan Tanah

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kebun Campuran	520,78	45,66
2	Permukiman	362,24	31,76
3	Tegalan/Ladang	107,74	9,45
4	Sawah Tadah Hujan	99,84	8,75
5	Sawah Irigasi	31,06	2,72
6	Semak/Belukar	18,84	1,66
	Total	1.140,50	100,00

Sumber : Pengolahan Data Tahun 2019

Jenis penggunaan tanah di daerah berlereng Desa Pagerharjo mayoritas sebagai kebun campuran. Adapun lokasi permukiman dijumpai di beberapa tempat yang umumnya berada di daerah landai sampai bergelombang. Masyarakat mengusahakan kebun campuran pada daerah-daerah di sekitar permukiman dimana masyarakat bertempat tinggal. Beberapa komoditi yang ditanam di daerah berlereng tersebut antara lain: kopi, cengkeh, coklat, pisang, kelapa, sengon, jati. Jenis penggunaan tanah lainnya yang dijumpai di daerah berlereng dan menjadi komoditi unggulan Desa Pagerharjo adalah kebun teh. Keberadaan kebun ini menjadikan produksi teh bisa menambah penghasilan bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Selain itu daerah ini juga merupakan objek wisata. Kebun Teh paling banyak dijumpai di Padukuhan Nginggo Barat dan Padukuhan Nginggo Timur di bagian utara Desa Pagerharjo yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Di sela-sela tanaman-tanaman tersebut masyarakat juga menanam pohon jati, mahoni, dan sengon sebagai tanaman pelindung terjadinya erosi dan juga bisa diambil hasilnya berupa kayu yang dijadikan bahan bangunan. Berbagai komoditi tersebut yang sebagian besar ditanam di daerah berlereng di Desa Pagerharjo. Khusus di Padukuhan Nginggo Barat dan Nginggo Timur mayoritas masyarakat menanam teh meskipun di daerah yang berlereng. Untuk teh yang dibudidayakan di daerah berlereng diolah tanahnya dengan sistem terasering, sedangkan yang di

pinggir-pinggir jalan dibudidayakan seadanya saja tetapi teratur susunan tanamannya. Hal inilah yang menjadikan kebun teh di Padukuhan Nglingga ini dijadikan sebagai tempat wisata dan dikenal dengan Desa Wisata Nglingga. Produksi teh di daerah ini bisa menambah pendapatan perkapita penduduk.

D. Penggunaan Tanah di Daerah Berlereng dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagerharjo

Desa Pagerharjo berada pada lereng 8-15% sampai dengan 30-40% dan ketinggian wilayah antara 300-880 meter. Dengan kondisi fisik tersebut maka wilayah Desa Pagerharjo terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi wilayah tanah usaha. Untuk ketinggian 100-500 dpal dan lerengnya tidak terlalu curam atau termasuk kategori daerah bergelombang, maka termasuk dalam Wilayah Tanah Usaha Utama Id (WTUU Id). Penggunaan tanah di WTUU Id ini antara lain diarahkan untuk tanaman keras dan tanaman perkebunan lainnya. Ketinggian wilayah antara 500-1.000 m dpal dan daerahnya bergelombang sampai berbukit sehingga lerengnya mulai agak terjal, termasuk dalam Wilayah Tanah Usaha Utama II (WTUU II). Daerah bergelombang dan berbukit, diarahkan untuk ditanami tanaman keras yang cocok dengan udara sejuk seperti cengkeh dan kopi.

Penggunaan tanah di WTUU I d disarankan untuk ditanami tanaman keras dan tanaman perkebunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi karena daerah ini topografinya adalah daerah bergelombang tetapi lerengnya tidak begitu curam. Sementara itu masyarakat setempat mengusahakan tanahnya yang berlereng tersebut banyak menanam kelapa, kopi, sengon, mahoni dan jati. Beberapa tanaman keras yang berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi di daerah berlereng tersebut seperti sengon dan jati banyak dijumpai, bahkan hampir di setiap kebun milik masyarakat terdapat tanaman tersebut. Meskipun tanaman ini baru bisa diproduksi setelah beberapa tahun, namun paling tidak bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan perkapita penduduk. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa penggunaan tanah saat ini sudah sesuai dengan arahan atau penggunaan tanah yang disarankan menurut konsep WTU.

Usaha tani yang disarankan di WTUU II adalah tanaman keras dan tanaman perkebunan. Di Pagerharjo, penggunaan tanah saat ini yang ada di WTUU II adalah kebun campuran. Beberapa komoditi yang dijumpai di kebun campuran yang diusahakan masyarakat antara lain adalah kelapa, pisang, kopi, cengkeh, teh. Komoditi yang sangat menonjol di WTUU II ini adalah kebun teh. Meskipun pada areal yang bukan merupakan kebun sejenis, tetapi teh ini banyak dijumpai di WTUU II seperti di Padukuhan Nglinggo Barat dan Nglinggo Timur. Bisa dimaklumi karena di kedua padukuhan tersebut letaknya berada pada ketinggian sekitar antara 600–800 meter dpl. Dengan udara yang sejuk, daerah ini merupakan daerah wisata kebun teh yang sudah terkenal secara regional maupun nasional. Di wilayah daerah tersebut banyak dijumpai penginapan atau *homestay* untuk tempat menginap para wisatawan. Dampak dari kondisi ini adalah bahwa Desa Pagerharjo khususnya Desa Wisata Nglinggo berhasil dinobatkan sebagai Juara I Desa Wisata Terbaik di Yogyakarta Tahun 2018. Desa ini menyajikan suguhan alam pegunungan dengan kesejukan kebun tehnya. Tidak mudah memenangkan menjadi Desa Wisata Terbaik di Yogyakarta, karena terdapat ratusan objek wisata yang sebagian besar adalah objek wisata perdesaan yang sebagian besar dikelola sebagai desa wisata (berdesa.com).

Mengacu pada pendapat Mosher (1987), salah satu aspek untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan. Hasil penghitungan pendapatan masyarakat di Desa Pagerharjo dari 17 (tujuh belas) antara Rp. 2.000.001,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- per tahun. Pendapatan bersih ini tergolong rendah karena apabila dihitung per bulan maka pendapatan tersebut menjadi sekitar Rp.167.000,- sampai Rp.250.000,-. Apabila dihitung pendapatan per-hari maka besarnya sekitar Rp.5.567,- sampai Rp.8.333,-. Oleh sebab itu usaha masyarakat di daerah berlereng lebih bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan utamanya dalam pencegahan erosi dari pada sebagai sumbangan pendapatan yang kontribusinya sangat sedikit.

Penghasilan lain yang lebih banyak menyumbang pendapatan masyarakat adalah usahanya di bidang non penggunaan tanah di daerah berlereng seperti menyewakan sawah, membuka warung, sebagai pamong desa, dan profesi lain selain usaha tani di daerah berlereng.

Selanjutnya apabila pendapatan dari penggunaan tanah berlereng dijumlahkan dengan pendapatan lainnya dan total pendapatan bersih responden dibagi dengan jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya, maka dihasilkan pendapatan perkapita per-tahun. Kisaran pendapatan perkapita di Desa Pagerharjo yang diwakili oleh responden pada kisaran antara Rp.5.000.000,- sampai Rp.6.000.000,- sebanyak 7 (tujuh) orang atau sebesar 41,18 %, dan kisaran Rp.6.000.000,- sampai Rp.7.000.000,- sebanyak 6 (enam responden atau sebesar 35,29 %. Besaran pendapatan perkapita tersebut termasuk tinggi, apabila dihitung per-bulan maka besarnya berkisar antara Rp.416.667,- sampai Rp.583.333,- atau Rp.13.889,- sampai Rp.19.444,- per-hari.

Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, garis kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta per-Maret 2018 adalah sebesar Rp.409.744,- perkapita per-bulan. Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Garis kemiskinan yaitu batas minimum pengeluaran perkapita per-bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang akan menggolongkan seseorang termasuk miskin atau tidak (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2018). Apabila ukuran batas kemiskinan ini dihitung dalam satuan tahun, maka garis kemiskinan di DIY berada pada angka $Rp.409.744,- \times 12 \text{ bulan} = Rp.4.916.928,-$

Apabila batas garis kemiskinan ini dibandingkan dengan pengeluaran perkapita menurut BPS, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita lebih besar dari Rp.5.000.000,- per tahun sudah bisa dikatakan sebagai batas tidak miskin karena sudah melebihi batas garis kemiskinan DIY Tahun 2018 sebesar Rp.4.916.928,-. Besarnya responden yang pendapatan perkapita nya lebih dari Rp.5.000.000,- per tahun adalah sebanyak 16 (enam belas) orang atau sebesar 99 %. Artinya bahwa setelah dikurangi untuk pengeluaran perkapita per-tahun, maka minimal masih ada tabungan sebesar $Rp.5.000.000,- - Rp.4.916.928,- = Rp. 83.072,-$ per-tahun sampai dengan $Rp.8.000.000 - Rp.4.916.928,- = Rp.3.083.072,-$ per-tahun. Angka ini merupakan angka pendapatan perkapita setelah

dikurangi pengeluaran perkapita, artinya sudah merupakan pendapatan perkapita per-tahun bukan pendapatan keluarga per-tahun.

Sebelum Tahun 2012, Desa Pagerharjo merupakan desa yang tergolong rawan pangan karena tingginya persentase masyarakat miskin dan berbagai masalah lain seperti kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, sulitnya akses keluar masuk desa akibat rendahnya sarana distribusi dan masih banyak permasalahan lainnya. Mulai tahun 2012 oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Desa menjadikan Desa Pagerharjo sebagai sasaran untuk menjalankan Program Desa Mandiri Pangan. Bersama-sama dengan stakeholder yang terkait, permasalahan Desa Pagerharjo dianalisis untuk diberikan solusinya. Tidak hanya di bidang pertanian saja, melainkan juga di bidang kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Beberapa tujuan dari Program Mandiri Pangan yang diterapkan antara lain: a. memfasilitasi dan mendorong kegiatan masyarakat dalam hal ketersediaan pangan, distribusi, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan; b. melakukan pendampingan dalam hal penguatan kelembagaan Lembaga Keuangan Desa (LKD), dan penguatan peran Tim Pangan Desa (TPD); c. mewujudkan Desa Pagerharjo menjadi Desa Mandiri Pangan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat desa serta penganekaragaman pangan sesuai dengan potensi juga jondisi local (Repository.umy.ac.id). Khusus tujuan program penganekaragaman pangan sesuai dengan kondisi lokal antara lain penanaman massal tanaman tahunan yang menghasilkan di daerah-daerah berlereng sekaligus dalam upaya untuk mencegah terjadinya erosi sehingga daerah-daerah yang berada di bawahnya menjadi lebih aman. Salah satu hasil dari Program Desa Mandiri Pangan di Desa Pagerharjo ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan perkapita penduduk yang diwakili oleh para responden.

Apabila ditinjau dari Undang-undang Kesejahteraan Sosial dimana kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, maka masyarakat Desa Pagerharjo bisa dikatakan sejahtera. Hal ini disebabkan karena dari segi material bisa terpenuhi yaitu tingkat pendapatan perkapita yang berada di atas garis kemiskinan DIY. Kebutuhan material yang berhubungan dengan pangan,

sandang, papan, dan juga kesehatan semua sarana dan prasarannya sudah tersedia di Desa Pagerharjo. Adapun kebutuhan spiritual yang dihubungkan dengan pendidikan, keamanan, dan ketenteraman hidup, bisa dikatakan semua terpenuhi dan ada di Desa Pagerharjo. Dari kebutuhan-kebutuhan ini yaitu material, sosial, dan spiritual semua terpenuhi, sehingga masyarakatnya meskipun bertempat tinggal di sekitar daerah yang berlereng, tetap saja bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup beserta dengan keluarganya masing-masing. Oleh karena itu segala fasilitas yang sudah lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat di Desa Pagerharjo tentunya harus dipertahankan keberadaannya sehingga masyarakat yang membutuhkan akan fasilitas tersebut akan mudah bisa memanfaatkannya.

E. Kesimpulan dan Saran

Penggunaan tanah di daerah berlereng di Desa Pagerharjo didominasi oleh jenis penggunaan tanah pertanian tanah kering yaitu kebun campuran berupa kopi, cengkeh, coklat, teh, kelapa, pisang, jati, dan sengon. Penggunaan tanah di daerah berlereng ini tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi berdampak terhadap kelestarian lingkungan khususnya pencegahan erosi. Kesejahteraan masyarakat lebih disebabkan karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian lebih dari satu, mayoritas berusaha di bidang lain untuk menambah penghasilannya. Selain itu lengkapnya fasilitas sosial yang ada di Desa Pagerharjo menyebabkan masyarakatnya mudah dalam mengakses segala macam kegiatan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, meskipun penggunaan tanah di daerah berlereng sudah ditanami tanaman keras pencegah erosi, sebaiknya dalam pengolahan tanah juga perlu diterapkan sistem terasering. Selain itu perlu optimasi penggunaan tanah di daerah berlereng dengan melakukan usaha tani yang lebih intensif lagi agar bisa menambah penghasilan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan di sekitarnya.

Ucapan Terima Kasih



Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah publikasi ini.

Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Sdr. Sugiharto yang telah membantu dan membersamai saat pengambilan data dari Lembah Sinogo sampai Puncak Nglinggo Desa Pagerharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik 2018, *Berita resmi statistik profil kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Departemen Pendidikan Nasional 2008, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka 2011, *Evaluasi kesesuaian lahan & perencanaan tata guna lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jayadinata, J T 1999, *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan & wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Suburi, J 2001, 'Konsep wilayah tanah usaha sebagai dasar penataan suatu wilayah', *Buletin Balitbang Dephan* Vol. VI, No. 7, Jakarta.
- Mosher, AT 1987, *Menggerakkan dan membangun pertanian*, Yasaguna, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, *Kamus besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sadyohutono, M 2016, *Tata guna tanah dan penyerasian tata ruang*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sony 2008, 'Air dan tanah sumber kehidupan', *Majalah Rona Alam dan Kehidupan*, Jakarta.
- Sandy, IM 1977, *Penggunaan tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Sugiyono 2011, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suripin 2002, *Pelestarian sumber daya tanah dan air*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ritohardoyo, S 2013, *Penggunaan dan tata guna lahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Waskito dan Hadi A 2017, *Pertanahan, agraria dan tata ruang*, Penerbit Kencana, Jakarta.

